

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa : Mersi Rante Allo
Stambuk : 4513012128
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen

Menyetujui :
Pembimbing I **Pembimbing II**

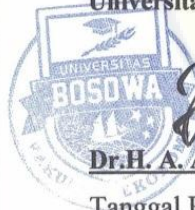

Dr. Haeruddin Saleh SE.,MSI


Dr. Chahyono SE.,M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

Ketua Program Studi Manajemen




Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH


Indrayani Nur, S.pd., SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mersi Rante Allo

Nim : 4513012 128

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 10 Juli 2017

Yang Bersangkutan,

Mersi Rante Allo

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Oleh :
MersiRanteAllo**

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

MERSIRANTEALLO.2017.Skripsi.Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh DrHaeruddin Saleh SE,M.Si dan Dr. ChahyonoSE,MSi.

Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan aspek rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisien pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengolahan data dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian dinas perkebunan provinsi sulawesi selatan tahun 2013 sebesar 1,07 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan efektif sebesar 1,66 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan, ini disebabkan karena lain-lain pendapatan yang sah bernilai nol. Rasio efektifitas dan rasio efisiensi juga mengalami kenaikan meskipun pada rasio efisiensi belum ada yang mencapai seratus persen.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS DINAS PERKEBUNAN SOUTH SULAWESI PROVINCE

By
MersiRanteAllo
Prodi Management Faculty Of Economics
University Bosowa

ABSTRACT

MERSIRANTEALLO, 2017. Thesis. Performance Analysis Of Financial Performance South Sulawesi Province is guided by Dr. Haeruddin Saleh SE, .MSi and DrChahyono SE, . MSi.

The purpose of research to know the financial performance aspect ratio independence, effectiveness ratio, efficient ratio at Plantation Service of South Sulawesi Province.

The research results show that from the results of data processing seen from the calculation of the independence ratio of plantation sector of southern Sulawesi province in 2013 amounted to 1.07 and in 2014 experienced an effective increase of 1.66 and in 2015 decreased, this is due to other income Legitimate value is zero. Effectiveness ratios and efficiency ratios also increased despite the absence of a hundred percent efficiency ratio.

Keywords: Performance Financial, independence ratio, ratio effectiveness, efficiency ratio

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan”**

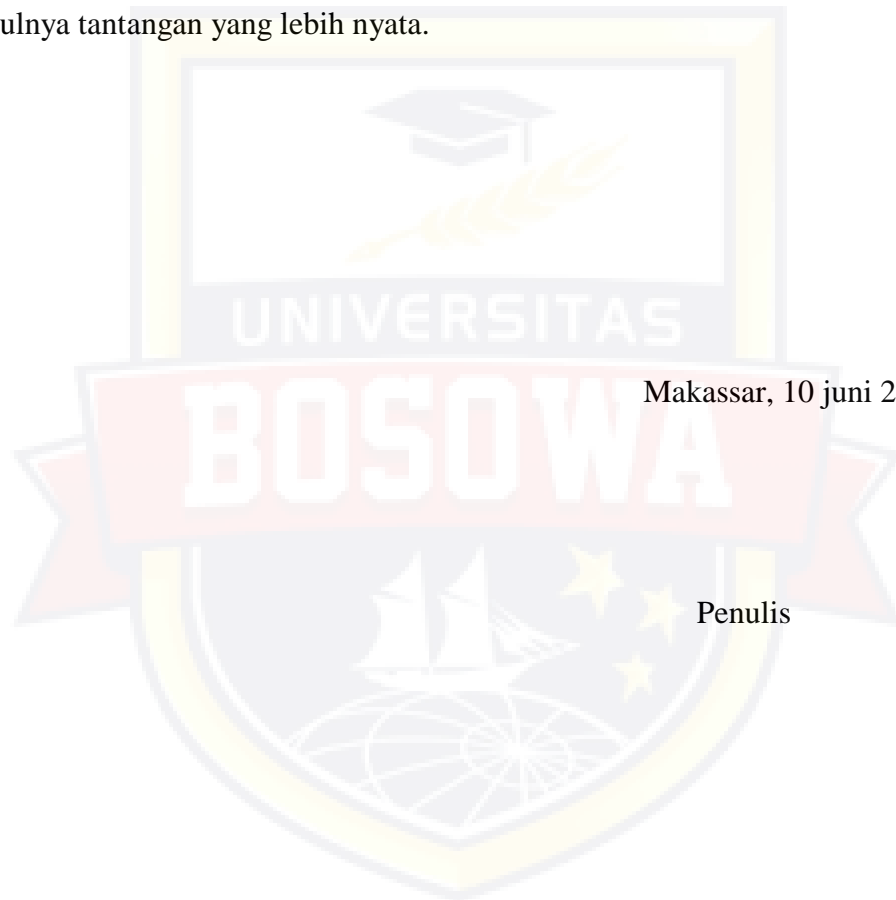
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Disamping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berupa materi, pikiran, motivasi serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu, lewat kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap unsur yang telah membantu penulisan untuk sampai pada tahap ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Saleh Pallu M. Eng Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

4. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Haeruddin Saleh SE.,MSiSelaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Cahyono SE.,MSiSelaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah serta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terimakasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
8. Kepala Dinas dan Jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tempat penulis melaksanakan penelitian. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan data serta penjelasan yang diberikan.
9. Terima kasih untuk Ayahanda Alm Ilyas Rante Allo dan Ibunda Maria Magdalena Basselo atas dukungan dan doa yang tak pernah putus.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Putu Darmayasa, Syamsir, Jefri Dominggus Simon, Andi Dahyar Setiawan, Rizky Amalia, M. Fadly M. Pasau, Desy Haryati, Diana Herlina, Irma Nirmaladewi dan seluruh teman-teman angkatan 2013.
11. Teman- teman KKN Kab. Bantaeng desa pajukukang angkatan-42 terima atas dukungan dan kebersamaannya selama dilokasi KKN.
12. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, motivasi dan bantuannya.

Akhirnya lewat skripsi ini, penulis ingin menyumbang secuil pengetahuan yang sekiranya dapat memberikan sebuah warna yang berbeda dalam menjawab tantangan zaman. Dan setidaknya penulis bangga jika pada akhirnya skripsi ini dapat menjadi acuan dalam membuat skripsi yang lebih sempurna lagi. Dan terakhir, apa yang penulis telah lalui bukanlah sebuah akhir, akan tetapi awal dari munculnya tantangan yang lebih nyata.



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	
.....	v
iii	
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2..1 Kerangka Teori	5
2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan.....	5
2.1.2. Kinerja.....	6
2.1.3. Kinerja Keuangan	10
2.1.4. Laporan Keuangan	9
2.1.5. Sifat Laporan Keuangan.....	16
2.1.6. Tujuan Laporan Keuangan	17
2.1.7. Pengertian Analisis Laporan Keuangan	19
2.1.8. Jenis laporan keuangan sektor public.....	20
2.1.9 Pengertian Dan Tujuan Analisis Rasio keuangan	22
2.2.Kerangka Pikir.....	28

2.3. Hipotesis	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN	30
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian	30
3.2. MetodePengumpulan Data	30
3.3. JenisdanSumber Data	30
3.4. MetodeAnalisis.....	31
3.5. definisiOperasional.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran umum Dinas Perkebunan	36
4.1.1 Latar Belakang Dinas Perkebunan	36
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perkebunan	38
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan.....	39
4.1.4 Peran dan Fungsi	41
4.1.5 Sumber Daya Manusia.....	44
4.2 Deskripsi Data	46
4.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Dinas Perkebunan	46
4.2.2 Analisis Laporan Keuangan	47
4.3 Analisis Data	52
4.4 Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Skema Kerangka Pikir.....	28
4.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan	40



DAFTAR TABEL

3.1	Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	32
4.1	Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Perkebunan	45
4.2	Neraca Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	49
4.3	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan	51
4.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dinas Perkebunan	53
4.5	Target, Biaya Pemungutan Dan Realisasi PAD Dinas Perkebunan	55
4.6	Rekapitulasi Hasil	

57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu instansi dalam pengelolaan keuangan sendiri, dalam arti sampai sejauh mana sebuah instansi mampu mengelola keuangannya sendiri untuk melaksanakan segala kewajiban instansi tersebut. Salah satu instansi yang dituntut agar memiliki laporan keuangan yang jelas baik adalah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan perda No. 08/Tahun 2008 tanggal 21 juli 2008 adalah menyelenggarakan urusan dibidang perkebunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan dan pascapanen dan sistem informasi perkebunan.
- b) Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, sarana prasarana perkebunan, perlindungan perkebunan, dan pascapanen dan informasi perkebunan.
Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perkebunan yang meliputi pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan, saranaprasarana perkebunan, perlindungan perkebunan, dan pascapanen dan sistem informasi perkebunan
- d) Penyelenggaraan tugas lain yang diberiakn gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu instansi. Semua instansi akan mempunyai perhatian yang besar pada bidang

keuangan. Untuk melihat sehat tidaknya suatu instansi tidak hanya dapat dinilai dari keadaan fisiknya saja , misalnya dilihat dari gedung dan pembangunan factor terpenting untuk dapat melihat sehat tidaknya suatu instansi juga dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh sebuah instansi sudah tepat atau belum.

Analisis laporan keuangan digunakan untuk memprediksi masa depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen analisis laporan keuangan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan dan yang lebih penting sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi dimasa depan. Informasi yang diperoleh dari analisis laporan keuangan dapat menunjukkan apakah instansi sudah mengalokasikan dana sehingga tepat sasaran. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh dengan pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi instansi pada masa sekarang dan masa lalu.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu juga dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator input (masukan) yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Output (keluaran) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Outcome (hasil) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dilihat dari uraian diatas dapat dimengerti betapa pentingnya analisis kinerja keuangan maka dari itu penulis menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari aspek kemandirian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari aspek efektifitas pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari aspek efisiensi pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan strategi. Agar kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan semakin baik.

- b. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan implementasi dari ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan yang telah didapat dari proses belajar penulis sehingga menambah wawasan penulis mengenai bagaimana penerapan teori dengan praktek yang sebenarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz Jr (2012:2) “manajemen keuangan (financial management) berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum”. Jadi, fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen asset. Keberhasilan ataupun kegagalan usaha hampir sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan, dengan kata lain masalah yang biasa timbul dalam setiap organisasi berimplikasi terhadap bidang keuangan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya. Penggunaannya harus tepat sasaran, efisien, dan efektif agar tujuan keuangan perusahaan dapat tercapai sesuai rencana. Manajemen keuangan merupakan salah satu ilmu utama dari manajemen. Manajemen keuangan pada awalnya hanya pada aktivitas entitas bisnis (organisasi) dalam kerangka penggunaan serta pengalokasian dana entitas.

sampai dari yang sebelumnya hanya mengutamakan kegiatan mendapatkan/memperoleh dana saja hingga mencakup kegiatan mendapatkan penggunaan dana hingga sampai ke pengelolaan atas asset (aktiva).

2.1.2. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Moehariono (2012:95) “kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi”. Kinerja menyangkut tiga komponen penting yaitu tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja.

Menurut Rivai (2013:604) “kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya”.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja atas suatu entitas bisnis sangatlah penting, pengukuran menentukan bagaimana suatu perusahaan akan berjalan, pengukuran kinerja akan menentukan baik atau tidaknya pada periode berjalan. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan atas visi dan misi organisasi. Produk dan jasa akan kehilangan nilai apabila kontribusi produk dan jasa tersebut tidak dikaitkan dengan

pencapaian visi dan misi. Menurut Dharma (2012:93) “Keberhasilan pencapaian strategi perlu diukur karena pengukuran merupakan aspek kunci dari manajemen kinerja atas dasar bahwa apabila tidak diukur maka tidak akan dapat meningkatkannya”.

Sasaran strategic yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategic untuk mewujudkan sasaran tersebut. Sasaran strategic beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menentukan target yang akan dijadikan basis penilaian kinerja, untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim atau unit organisasi. Menurut Whittaker dalam Moehariono (2012:72), “pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*)”.

Menurut Moehariono (2012:96), “pengukuran kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi”. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat sistem pengukuran kinerja menurut Yuwono (2008:29) adalah:

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang yang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan.
2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (*reduction of waste*).
4. Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun consensus untuk melakukan suatu perubahan dengan member "*reward*" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

4. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemda. Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi :

1. Indikator masukan (*inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2. Indikator proses (*process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator keluaran (*output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator hasil (*outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator manfaat (*benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6. Indikator dampak (*impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat

2.1.3. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2010:30) bahwa “kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya”.

Sedangkan menurut Kusnadi (2001:367) kinerja keuangan adalah ukuran dan patokan kinerja merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh setiap karyawan, sementara Fahmi (2010:142) mengemukakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai hasil operasi perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan dalam periode tertentu, dan pada dasarnya merupakan cerminan dari kinerja manajemen pada periode tersebut. Menurut Erich A. Helfert kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan dimasa lalu.

Menurut Marjono dan Harjito (2005:52) bahwa kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang

selanjutnya menurut soetrisno (2005:250) bahwa kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laba, rugi dan neraca.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan dalam suatu perusahaan yang dapat memberikan informasi dari kondisi keuangan dalam suatu perusahaan dalam satu periode tertentu gambaran keuangan dan prestasi atau hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu :

1. Pendapatan asli daerah
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah (BUMD)
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi

- a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan-undangan.
3. Lain –lain pendapatan yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasi itu berada didaerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Adapun pembiayaan pemerintah pusat diatur sebagai berikut:

- a. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat didaerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.
- b. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibayar dari dan atas beban APBD.
- c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah diatasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan.

2.1.4. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Ambarwati (2010:203) mendefinisikan pengertian laporan keuangan adalah mengestimasi arus kas bebas masa depan, dalam rencana operasi yang berbeda, meramalkan kebutuhan modal perusahaan dan kemudian memilih rencana yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Kasmir (2011:54) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Sugiarso dan Winarni (2012:25) bahwa laporan keuangan (*finance statement*) merupakan daftar ringkasan akhir transaksi keuangan organisasi yang menunjukkan semua kegiatan operasional organisasi yang menunjukkan semua kegiatan operasional organisasi dan akibatnya selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut Budi Raharjo(2011) laporan keuangan adalah pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercaya kepada pihak-pihak yang punya kepentingan (*stake holders*) diluar perusahaan, pemilik perusahaan, pemerintah, kreditur, dan pihak lainnya. Kondisi keuangan

suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama dilakukan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. Suatu laporan keuangan (*financial statement*) akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang terjadi dimasa mendatang. Semakin baik kualitas

laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin menyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut

Sudjaja dan Berlian (2003:76) mengatakan bahwa “laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut”.

Menurut Kasmir (2016:7) “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu, maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode misalnya tiga bulan. Atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan yang lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu

menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

2.1.5. Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:11) “Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah- kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan pada sifat laporan keuangan itu sendiri”. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis

Artinya bahwa laporan keuangan dibuat disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun periode sebelumnya).

2. Bersifat menyeluruh

Maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

Jadi segala sesuatu yang tercermin dalam laporan keuangan merupakan fakta historis. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara utuh kedepan. Artinya, ada pos-pos yang dicatat sehingga tidak tampak dalam laporan keuangan, misalnya adanya pesanan yang tidak dapat

dipenuhi atau kontrak-kontrak penjualan dan pembelian yang telah disetujui. Hal-hal lain yang juga digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah kebiasaan seperti berikut ini :

1. Menganggap perusahaan akan berjalan terus-menerus. Dengan demikian, nilai yang tercatat dalam laporan keuangan merupakan nilai untuk perusahaan yang masih berjalan harga didasarkan pada saat terjadi peristiwa. Artinya jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan bukan harga nyata atau realisasi pada saat dijual sekarang atau dilikuidasi.
2. Menganggap daya beli uang akan tetap stabil. Artinya semua transaksi atau peristiwa dicatat dalam jumlah uang dan tidak mengadakan perbedaan antara nilai dari berbagai tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya hal ini bertentangan dengan kenyataan sebenarnya karena dalam praktiknya justru daya beli uang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Pendapat pribadi (*personal judgment*) artinya walaupun pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan didasarkan pada dalil tersebut tergantung dari pendapat manajemen perusahaan. Artinya juga pendapat atau judgment ini juga tergantung dari kemampuan para pembuatnya yang kemudian dikombinasikan dengan fakta serta dalil-dalil akuntansi yang disetujui.

2.1.6. Tujuan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan yang ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2004:3) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan menyediakan informasi

yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang tujuan pembuatan lag dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut.

Sementara menurut Kasmir (2016:10) beberapa tujuan pembuatan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan

keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui kondisi keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, laporan keuangan tidak hanya sekedar cukup dibaca saja, tetapi juga dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan suatu perusahaan saat ini. Caranya adalah dengan melakukan analisis keuangan melalui berbagai rasio keuangan yang lazim dilakukan.

2.1.7 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama masa periode tertentu.

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Hasil analisis keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, dengan mengetahui kelemahan ini manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut, kemudian kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Kekuatan ini dapat dijadikan modal selanjutnya kedepan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki akan tergambar kinerja manajemen tersebut. Pada akhirnya bagi pemilik dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan kedepan. Perencanaan kedepan dengan cara dengan cara menutupi kelemahan yang ada.

2.1.8 Jenis Laporan Keuangan Sektor public

Bentuk laporan keuangan sector public menurut standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Elemen-elemen yang terdapat dalam realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan (basis kas) yaitu semua penerimaan kas umum Negara/ kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu lagi dibayar oleh pemerintah.

- b) Belanja yaitu semua pengeluaran kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan.

2. Neraca

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi asset, kewajiban dan ekuitas dana. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selis antara asset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah salah bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan arus kas adalah :

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum Negara/daerah.

- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum Negara atau daerah

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, catatan laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan secara wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a) Informasi tentang kebijakan fiscal keuangan, ekonomi makro, pencatatan target undang-undang APBN, serta kendala dan hambatan yang dihadapi pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

2.1.9 Pengertian Dan Tujuan Analisis Rasio Keuangan

1. Pengertian Analisis Ratio Keuangan

Analisis merupakan penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi, sedangkan rasio adalah alat ukur perbandingan antara dua atau lebih aspek yang dinyatakan dalam angka, jadi analisis rasio yaitu suatu penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan dengan melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya yang dinyatakan dalam suatu bentuk angka.

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika dilihat satu sisi saja, artinya jika hanya dengan melihat apa adanya. Angka-angka ini akan menjadi lebih apabila dapat dibandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya, caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu.

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne (2012:64) merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap orang-orang yang duduk dalam manajemen ke depan.

Dalam praktiknya menurut Kasmir (2016:105), analisis ratio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut :

- a. Rasio Neraca yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
- b. Rasio Laporan Laba Rugi yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
- c. Rasio antarlaporan yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran), baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.

2. Tujuan Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisa rasio keuangan dapat digunakan untuk :

- a. menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Menilai pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

3. Metode dan Teknik Analisis APBD (Dinas dengan Rasio)

Pemerintah daerah sebagai yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Untuk lembaga pemerintah, rasio-rasio yang digunakan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) adalah analisa rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Secara sederhana rasio kemandirian diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/ provinsi dan pinjaman}} \times 100 \%$$

rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektifitas pendapatan asli daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektifitas diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Target penerimaan PAD

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal satu atau sebesar 100%. Semakin besar rasio ini, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

3. Rasio Efisiensi

Rasio keserasian/komposisi belanja, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian itu diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

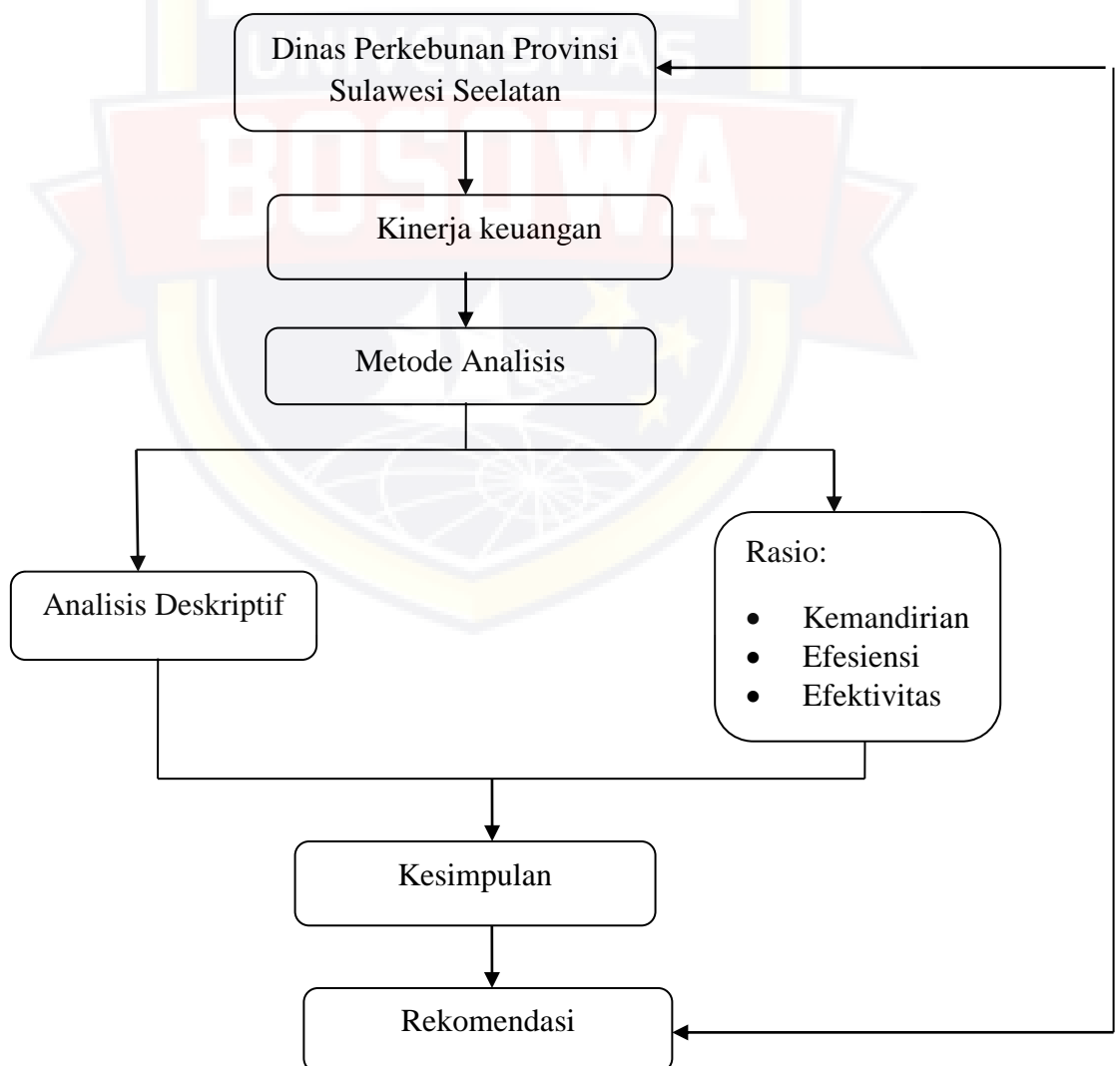
Kinerja pemerintah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara hemat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena

meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatannya kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang diajukan untuk penelitian ini berdasarkan pada hasil telaah teoritis seperti yang telah diuraikan diatas. Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang kerangka pikir penelitian, maka dapat dilihat dalam gambar.

Gambar 2.1 skema pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan pokok masalah yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

“ Diduga bahwa rasio efektivitas, rasio efisien dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap kinerja keuangan dinas perkebunan provinsi sulawesi selatan”



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di jalan Perkebunan No. 7 Kec. Panakukang, Sinrijala kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, gambaran secara sistematis, factual dan akurat dari data-data penelitian .

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *studi-studi* kasus dan langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan menunjang penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder dan untuk mengetahui indikator-indikator variable yang diukur.

2. Observasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat menurut laporan keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber data

3.3.1 jenis data

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Jenis data kualitatif ini adalah data sekunder yaitu data yang telah mengalami proses pengolahan oleh sumbernya yang tersedia dibuku-buku, makalah dan sumber lainnya secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pimpinan dan pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada bagian keuangan.
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala seperti laporan keuangan tahunan.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis adalah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Untuk menganalisis digunakan, data yang telah dikumpulkan dan diorganisasikan

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh data yang tepat, pengumpulan data dan analisis data merupakan proses yang bersamaan dalam penelitian kuantitatif. Sebagai implementasi peneliti mengumpulkan data sesuai dengan masalah peneliti melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti laporan keuangan
2. Melakukan analisis rasio keuangan
3. Melakukan analisis kinerja keuangan secara *time series*

Adapun rasio yang digunakan oleh penulis untuk meneliti laporan keuangan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Rasio Kemandirian

Secara sederhana Rasio Kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/ provinsidan pinjaman}} \times 100 \%$$

TABEL 3.1
POLA HUBUNGAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN DAERAH

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% -50%	Konsulatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

Sumber : abdul halim(2007:169)

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

2. Rasio Efektifitas

Secara sederhana Rasio Efektifitas dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Kriteria Rasio efektifitas adalah sebagai berikut :

- a. jika diperoleh nilai kurang dari 100% (< 100%) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (=100%) berarti efektifitas berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (>100%) berarti efektif

3. Rasio Efisiensi

Secara sederhana rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% .

semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

3.5 Definisi Operasional

Indikator-indikator dalam operasional variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2. Efisiensi adalah jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah tercapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal dalam memperoleh hasil yang diinginkan.
3. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan (pencapaian tujuan), sejauh mana seseorang menghasilkan keluhan sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, dan yang lain.
4. Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi.
5. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

6. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan pemerintah yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah, pajak dan pendapatan lain-lain yang sah selama satu periode tertentu.
7. Realisasi belanja adalah keseluruhan pengeluaran organisasi / instansi untuk melaksanakan aktivitasnya dari pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.1 Latar Belakang Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kantor pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan produktivitas tanaman perkebunan tahunan maupun semusim. Adapun tanaman tahunan atau penyegar meliputi , tanaman kelapa sawit, kelapa dalam , jambu mete, karet, kakao, kopi, teh, kemiri. Sedangkan tanaman semusim dan rempah meliputi : tebu, kapas, tembakau, nilam, cengkeh, lada, pala, vanili.

Pembangunan perkebunan kedepan diarahkan pada upaya penguatan di hilir yaitu pengembangan industri yang maju yang didukung sumberdaya perkebunan yang kuat melalui pemberdayaan di hulu dalam rangka meningkatkan nilai tambah,kualitas dan daya saing, pemasaran serta ekspor. Didukung dengan luas wilayah perkebunan dan potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan memiliki perkebunan karet dan kelapa sawit seluas 35.000 Ha, kakao seluas 36.215,46 Ha, cengkeh seluas 5.096,96 Ha, kakao seluas 36.215,46 Ha, jambu mete seluas 13.538,05 Ha.

Meskipun kinerja pembangunan perkebunan belum eksis dipenguatan hilir dengan basis hulu, namun peranan dan kontribusinya selama ini telah memberikan hasil yang nyata terhadap perekonomian secara luas dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu peran dan kontribusi pertanian akan

terus dipacu sejalan dengan tuntutan dan perkembangan iptek serta perubahan dalam tatanan nilai baik ekonomi, politik dan lingkungan hidup.

Potensi dan keunggulan pada komoditi perkebunan yang dimiliki terus dioptimalkan yang telah banyak memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi harapan untuk diwujudkan sebagai wilayah sebagai wilayah perkebunan yang maju dan mandiri berbasis komoditi unggulan. Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan perkebunan dan memperhatikan potensi keunggulan lokal, maka ditetapkan rencana strategis (renstra) selama 5 tahun kedepan yang bernuansa pada penerapan sistem pembangunan yang cerdas, kreatif dan inovatif sejalan dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi, program dan kegiatan dilaksanakan selama tahun kedepan. Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kinerja organisasi dalam menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan seiring tidak terduga, maka dikembangkan model analisis model perencanaan strategis pada analisa lingkungan strategis.

Memperhatikan peranan sub sektor perkebunan baik tantangan maupun peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan, maka arah strategi dan kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dititikberatkan pada kebijakan pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan yaitu peningkatan sebesar-besarnya

bagi kesejahteraan masyarakat. Secara nasional sub sektor perkebunan memberikan kontribusi peningkatan devisa negara dan PDRB terbesar diluar minyak dan gas bumi serta penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sehubungan dengan strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan provinsi sulawesi selatan, maka sasaran pembangunan perkebunan ke depan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan meningkatnya pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan hingga tahun 2018.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Visi

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan “ Terwujudnya Perkebunan Maju, Mandiri, Berbasis Komoditi Unggulan Dalam Mendukung Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional”. Dari visi tersebut diharapkan pencapaian produksi, produktivitas komoditi unggulan perkebunan, pencapaian jumlah sarana pengolahan, pembinaan mutu, terbentuknya dan terbinanya kelompok tani , tersedianya sarana dan prasarana perkebunan dapat terwujud.

2. Misi

1. mengembangkan perkebunan yang lebih produktif dan berkualitas melalui pemanfaatan potensi dan penguatan komoditi unggulan.
2. mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan melalui pengembangan sarana pengolahan dan agroindustri.
3. mendorong penguatan kelembagaan perkebunan untuk meningkatkan akses dan jejaring melalui kerjasama dan kemitraan usaha.

4. mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan serta peningkatan teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.

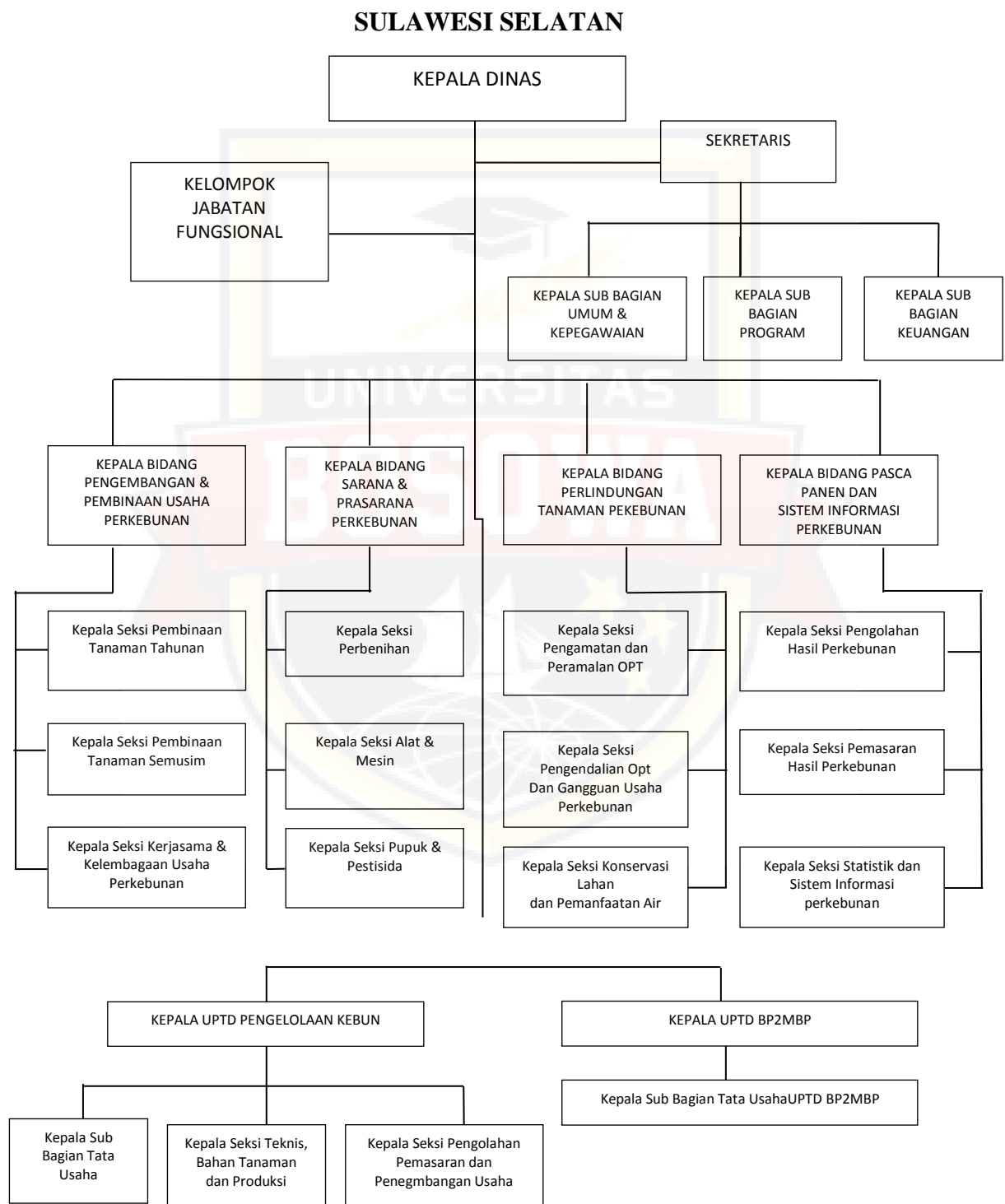
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau jumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi memerlukan manajemen yang baik agar bisa mencapai tujuan. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Apalagi semakin kompleks hubungan aktivitas didalamnya, maka terbentuklah struktur organisasi yang menggambarkan suatu sistem tugas wewenang dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing pegawai pemerintahan yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian organisasi dapat berjalan dinamis sesuai dengan kedinamisan masyarakat. Sehingga bentuk organisasi selalu menyesuaikan diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu syarat untuk menunjang suksesnya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tanpa adanya struktur organisasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan, maka ada kemungkinan terjadinya kesipang siuran dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini diperlukan adanya struktur organisasi yang dapat mengatur tugas dan

tanggung jawab serta wewenang dan masing-masing bagian yang terdapat dalam lingkungan organisasi perusahaan yang bersangkutan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI



Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Selatan

4.1.4 Peran dan Fungsi

Pengambilan keputusan dalam Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan terutama dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas, terutama hal yang menyangkut keputusan yang bersifat strategis. Namun keputusan yang bersifat operasional kadang-kadang dilimpahkan kepada Sekeraris, Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan . Setiap kepala bagian dapat membuat suatu keputusan yang dapat memperlancar kegiatan departemennya. Dengan demikian, prakarsa dari bawah tetap dapat dikembangkan selama prakarsa tersebut diperkirakan akan membawa keuntungan bagi perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.

Adapun tugas dan kewajiban dari masing-masing bagian dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Sekertaris

Kewajiban sekretaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dikte dari kepala dinas
- 2) Melaksanakan korespondensi (menerima dan mengirim surat)
- 3) Menyimpan arsip-arsip yang dinilai penting.
- 4) Menerima tamu-tamu kepala dinas.

B. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Kewajiban kepala sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian
- 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah Dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan dinas.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan dilingkungan dinas.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
- 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- 7) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor.
- 8) Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas.
- 9) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas.
- 10) Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan investasi perlengkapan dinas hasil pengadaan.
- 11) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana

- 12) Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan dinas
- 13) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti pegawai, dan lain-lain.
- 14) Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian.
- 15) Penyimpanan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai.

C. Kepala Sub Bagian Program

- 1) Subbagian program dipimpin oleh seorang kepala subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- 2) Penyusunan perencanaan program subbagian program dan badan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
- 4) Pelaksanaan tugas penyusunan program bidang ;
- 5) Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Membantu sekretaris, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program;
- 7) Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja subbagian program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 8) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

- 9) Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 10) Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- 11) Menyusun rencana dan program kerja dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang;
- 12) Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- 13) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a) Perencanaan penyusunan progam dan kegiatan subbagian keuangan
- b) Pelaksanaan administrasi keuangan dinas perkebunan
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas perkebunan
- d) Pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan

4.1.5 Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Manajemen sumber daya manusia pada umumnya untuk memperoleh tingkat perkembangan karyawan setinggi-tingginya, hubungan kerja

yang serasi diantara karyawan dan penyatupaduan sumberdaya manusia secara efektif atau tujuan efisiensi dan kerjasama sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bidang strategis dari organisasi.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, maka Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ditopang oleh ketersediaan jumlah personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi /tata kerja sebagaimana pada tabel 4.1 dibawah ini

TABEL 4.1
TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PEGAWAI
DINASPERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tingkat Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan			Jenis Kelamin		
	Teknis	Non Teknis	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
S.3	2	-	2	2	-	2
S.2	9	11	20	11	9	20
S.1	73	58	131	61	70	131
Sarjana Muda	2	5	7	2	5	7
SLTA	26	40	66	41	25	66
SLTP	-	3	3	3	-	3
SD	-	2	2	2	-	2
Total	112	119	231	122	109	231

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan keuangan daerah membawa angin segar terhadap demokrasi dan pembangunan di daerah, sebab dengan implementasi undang-undang tersebut berarti daerah memiliki kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangga sendiri, termasuk didalamnya adalah kewenangan yang lebih besar dalam hal penyusunan anggaran. Peningkatan kewenangan tersebut akan membawa kepada penyusunan anggaran yang lebih aspiratif bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public:

1. kejelasan pengelolaan misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran pada khususnya.
2. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan anggaran, seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah dan perangkat daerah lainnya.
3. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, data pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
4. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah, PNS daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangan.
5. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi tahun.

6. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan aset daerah yang lebih profesional
7. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntabilitas dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi anggaran kepada publik.
8. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan peran pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
9. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan, pengendalian serta kemudahan mendapatkan informasi.

Surat keputusan menteri dalam negeri no 29 tahun 2002 tentang pedoman pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, telah menggariskan secara detail pedoman seluruh pemerintah daerah, sistem perencanaan ini menuntut kepala daerah untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang pada penyusunan dan menjabarkan visi dan misi daerah. Dokumen tersebut dijabarkan lagi menjadi dokumen rencana jangka pendek lima tahunan.

4.2.2 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga

mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha lalu dan sekarang. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik untuk memberikan informasi kepada publik. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan para pemakainya. Keputusan yang diambil oleh para pemakai laporan keuangan sangat bervariasi, tergantung kepentingan mereka. Informasi keuangan yang ada pada laporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan.

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu organisasi publik juga wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang berisi gambaran tentang kondisi keuangan serta kinerja yang dicapai untuk pertanggung jawaban kepada publik. Selain itu laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau lembaga legal lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Dalam menganalisis kinerja keuangan sektor publik pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, dibutuhkan laporan keuangan sebagai acuan analisis. Berikut ini adalah laporan keuangan yang disajikan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel

TABEL 4.2
NERACA KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2013-2015

Uraian	Tahun Anggaran		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
Aset	-	-	41.407.875
Aset lancar	-	-	-
Kas dibendahara pengeluaran	-	-	-
Kas dibendahara penerimaan	-	-	-
Kas BLUD	-	-	-
Piutang pajak	-	-	-
piutang retribusi	-	-	-
Persediaan	212.500,00	-	4.458.875
Jumlah Aset Lancar	212.500,00	-	45.866.750
ASET TETAP			
Tanah	76.402.000.000	76.402.000.000	76.402.000.000

1	2	3	4
Peralatan dan mesin	4.639.757.980	7.214.387.980	9.794.411.135
Gedung dan bangunan	2.437.294.000	6.145.296.324	7.914.213.324
Jalan, irigasi dan jaringan	-	309.705.000	513.705.000
Aset tetap lainnya	1.317.876.450	1.318.478.550	1.514.892.300
Kontruksi dalam pengerjaan	2.651.603.986	-	-
Akumulasi penyusutan	4.638.898.371	(5.471.251.395)	(5.881.138.835)
Jumlah Aset Tetap	82.810.236.144	85.918.616.458	90.258.082.924
Aset lainnya			
Aset tak berwujud	274.800.000	314.400.000	585.960.000
Jumlah Aset Lainnya	274.800.000	314.400.000	585.960.000
Total Asset	83.085.248.644	86.233.016.458	90.889.909.674
Kewajiban	-	-	-
Kewajiban jangka pendek	-	-	-
Utang perhitungan pihak ketiga	-	-	41.407.875
Utang beban	-	-	98.750.705
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	140.158.580
Ekuitas dana	42.455.866.861		
Ekuitas		28.008.478.244	(26.997.548.167)
RK PPKD	42.455.866.861	58.224.538.214	117.747.299.261
Jumlah Ekuitas	83.085.036.144	86.233.016.458	90.749.751.094
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	83.085.248.644	86.233.016.458	90.889.909.674

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Selain itu pada laporan keuangan terdapat pula laporan laba rugi yang mencerminkan hasil yang dicapai selama satu periode tertentu, dimana pada instansi pemerintah dikenal dengan realisasi anggaran yaitu mengenai dana yang terpakai dan jumlah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selama satu

periode. Laporan realisasi anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel.

TABEL 4.3

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERKEBUNAN DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2015**

Uraian	Tahun Anggaran		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
Pendapatan			
Pendapatan asli daerah	2.400.000.000	2.550.000.000	2.703.342.100
Lain-lain pendapatan	1.115.262.000	1.531.386.000	1.720.220.100
Jumlah Pendapatan	3.515.262.000	4.081.386.000	4.423.562.200
Belanja operasi			
Belanja pegawai	1.612.708.000	56.220.450.000	57.380.813.242
Belanja barang dan jasa	23.873.816.350	17.980.340.000	18.774.301.946
Belanja Modal	-	4.243.207.089	4.845.289.905
Belanja tanah	-	-	-
Belanja peralatan dan mesin	-	2.224.023.000	2.565.023.155
Belanja gedung dan bangunan	-	1.345.789.000	1.593.293.000
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	-	203.050.000	204.000.000
Belanja aset tetap lainnya	-	210.003.089	211.413.750
Belanja aset lainnya	-	260.342.000	271.560.000
Jumlah Belanja Modal	-	4.243.207.089	4.845.289.905

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 2017

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Rasio Keuangan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan

Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik khususnya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama kaidah pengaturannya. Meskipun demikian, dalam rangka laporan keuangan daerah yang transparan, jujur demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perkebunan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode ke periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan dinas lain yang terdekat maupun potensi kantor lain yang terdekat maupun potensi kantor lain yang relatif sama untuk melihat bagaimana posisi keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang diformulasikana sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ektern.rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.Semakin tinggi rasio berarti ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

TABEL 4.4
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2015

Uraian	Tahun Anggaran		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
Pendapatan asli daerah	2.400.000.000	2.550.000.000	2.703.342.100
Dana perimbangan	2.258.000.000	-	-
Lain-lain pendapatan yang sah	1.115.262.000	1.531.386.000	1.720.220.100
Jumlah pendapatan	5.773.262.000	4.081.386.000	4.423.562.200

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian tahun 2013} &= \frac{2.400.000.000}{2.258.000.000 + 1.115.262.000} \times 100\% \\ &= 1,07 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian tahun 2014} &= \frac{2.550.000.000}{1.531.386.000} \times 100\% \\ &= 1,66 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio kemandirian tahun 2015} &= \frac{2.703.342.100}{1.720.220.100} \times 100\% \\ &= 1,57 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa kemandirian Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencukupi pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 0,59 dan pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,09.

2. Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

Rasio ini menggambarkan kemampuan Dinas Perkebunan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai dapat mencapai minimal satu atau 100 persen. Rasio efektifitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{rasioefektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

TABEL 4.5
TARGET, BIAYA PEMUNGUTAN DAN REALISASI PAD DINAS
PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2015

Uraian	Tahun Anggaran		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
Target PAD	2.258.000.000	2.379.000.000	2.470.000.000
Biaya Pemungutan PAD	1.110.000.000	1.220.000.000	1.623.000.000
Realisasi PAD	2.400.000.000	2.550.000.000	2.703.342.100

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi selatan 2017

Dengan data diatas dapat dihitung besar rasio efektifitas sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektifitas tahun 2013} &= \frac{2.400.000.000}{2.258.000.000} \times 100 \% \\ &= 1,06 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektifitas tahun 2014} &= \frac{2.550.000.000}{2.379.000.000} \times 100 \% \\ &= 1,07 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektifitas tahun 2015} &= \frac{2.703.342.100}{2.470.000.000} \times 100 \% \\ &= 1,09 \end{aligned}$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data dari tabel 4.10 diatas dapat dihitung besar rasio efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi tahun 2013} = \frac{1.110.000.000}{2.400.000.000} \times 100 \%$$

$$= 0,4$$

$$\text{Rasio efisiensi tahun 2014} = \frac{1.220.000.000}{2.550.000.000} \times 100 \%$$

$$= 0,47$$

$$\text{Rasio efisiensi tahun 2015} = \frac{1.623.000.000}{2.703.342.100} \times 100 \%$$

$$= 0,60$$

Dari perhitungan rasio efektifitas diatas dalam merealisasikan PAD yang direncanakan pada tahun 2013-2015 terus mengalami kenaikan rata-rata 0,01 disebabkan dengan meningkatnya PAD dari tahun 2013-2015, dapat dilihat pada tahun 2013 PAD sebesar Rp 2.400.000.000, pada tahun 2014 sebesar Rp 2.550.000.000, pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.703.342.000. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan PAD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pada tahun 2013- 2014 mengalami kenaikan

sebesar 0,01 sementara pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang sebesar 0,1.

TABEL 4.6
REKAPITULASI HASIL

RASIO	TAHUN		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
KEMANDIRIAN	1,07	1,66	1,57
EFEKTIFITAS	1,06	1,07	1,09
EFISIENSI	0,46	0,47	0,60

Hasil pengukuran rasio, 2017

4.4 Pembahasan

Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio kinerja keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari periode ke periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah dimulai dari (1) rasio kemandirian (2) rasio efektivitas (3) rasio efisien. Hal-hal ini dilakukan agar konsisten dengan bab-bab yang lain.

1. Rasio Kemandirian

Pada analisis data, pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 2.400.000.000 pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.550.000.000 dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan

sebesar Rp 2.703.342.100 pada tahun 2013 dana perimbangan Rp 2.258.000.000 pada tahun 2014 dan 2015 tidak terdapat dana perimbangan, pada tahun 2013 pendapatan lain-lain sebesar Rp 1.115.262.000 pada tahun 2014 Rp 1.531.386.000, dan pada tahun 2015 terus mengalami kenaikan sebesar Rp 1.720.220.100. Perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2013 adalah 1,07% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,66% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan 1,57%. dari hasil yang didapatkan hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan dinas perkebunan terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah juga menggambarkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi.

2. Rasio efektifitas

Pada analisis data, target PAD pada tahun 2013 sebesar Rp 2.258.000.000 pada tahun 2014 Rp 2.379.000.000 dan pada tahun 2015 Rp 2.470.000.000. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2013 Rp 1.110.000.000 tahun 2014 Rp 1.120.000.000 pada tahun 2015 Rp 1.623.000.000. Realisasi PAD tahun 2013 Rp 2.400.000.000 tahun 2014 Rp 2.550.000.000 tahun 2015 Rp 2.703.342.100. perhitungan rasio efektifitas pada tahun 2013 sebesar 1,06%, tahun 2014 1,07% dan pada tahun 2015 1,09%. Rasio efektifitas menggambarkan

kemampuan dinas perkebunan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dari hasil analisis data dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan mencapai seratus persen hal ini menunjukkan bahwa dinas perkebunan telah efektif dalam menjalankan tugasnya.

3. Rasio Efisiensi

Dari analisis data, pada tahun 2013 biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Rp 1.110.000.000 pada tahun 2014 Rp 1.220.000.000 dan pada tahun 2015 Rp 1.623.000.000. realisasi PAD pada tahun 2013 Rp 2.400.000.000 pada tahun 2014 Rp 2.550.000.000 dan pada tahun 2015 Rp 2.703.342.100. perhitungan rasio efisiensi menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja apatur dan belanja pelayanan publik. Pada perhitungan rasio efisiensi tahun 2013 0,46% pada tahun 2014 0,47% dan pada tahun 2015 0,60%. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang diterima. Dari hasil yang dilihat dinas perkebunan dikategorikan telah memenuhi kriteria efisiensi karena dari tahun 2013-2015 tidak mencapai 100%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sebesar 1,07 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan efektif sebesar 1,66 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,55. penurunan ini disebabkan karena lain-lain pendapatan yang sah bernilai nol.
2. Rasio efektifitas yang ditunjukkan pada tahun 2013 sebesar 1,06, pada tahun 2014 sebesar 1,07 dan pada tahun 2015 sebesar 1,09 dilihat dari tahun ketahun mengalami peningkatan tersebut mengindikasikan kemampuan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan merealisasikan penerimaan PAD sudah maksimal karena setiap tahun mengalami kenaikan.
3. Dari rasio efisiensi selama tahun 2013-2014 mengalami kenaikan yaitu tahun 2013 0,46 tahun 2014 sebesar 0,47, dan pada tahun 2015 0,60. Meskipun dari tahun 2013-2015 terus mengalami kenaikan namun tidak ada yang mencapai seratus persen. Hal ini terjadi karena besarnya biaya yang digunakan untuk pemungutan PAD.

5.2 Saran

Setelah hasil analisis dipadukan dalam suatu kesimpulan, maka selanjutnya penulis akan mencoba menyarankan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau instansi sebaiknya dilengkapi dengan rasio dan analisa-analisa yang dipandang penting , agar dapat menyediakan informasi yang lebih rinci yang sangat bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan, baik ekstern maupun intern.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu instansi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian dilingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwaty,sri,dwi ari.2010. Manajemen Keuangan Lanjutan Cetakan Pertama.
Yogyakarta: graha ilmu
- Budi rahardjo.2011.Laporan Keuangan Perusahaan. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press
- Dr Kasmir.2016.Analisis Laporan Keuangan.jakarta: PT Grafindo Persada
- Dharma, surya.2012.manajemen kinerja.yogyakarta: pustaka pelajar
- Drs. S.Munawir.2010. analisa laporan keuangan.yogyakarta: Liberty
- G sugiarso dan F Winarni.2012.Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Media
Pressindo
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2004. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Bumi
Aksara
- Irham Fahmi.2011. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung : Alfabeta
- James C van Horne dan john m. wachowicz jr. 2012. Manajemen
Keuangan.jakarta : Salemba Empat
- Kusnadi. 2001.Akuntansi Pemerintahan (publik). Bandung : UNIBRAW malang
- Moeheriono.2012.pengukuran kinerja berbasis kompetensi.Jakarta: Rajawali Press
- Martono dan D Agus Harjito.2005. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia
- Rivai, viethzal sagala, Ella jauvani.2013.Manajemen Sumber Daya Manusia
Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sofian Syafri Harahap. 2011.Teori Akuntansi Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
- Sudjaja, Ridwa S dan Inge Barlian.2003.Manajemen Keuangan Satu Edisi
Kelima. Jakarta: Literata Lintas Media.
- <http://repositori.unhas.ac> (12 april 2017)
- fadhilanalisis.blogspot.co.id/2011/10/analisis.laporan.keuangan.html (12april
2017).